

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Organisasi Pendidikan

###### a. Pengertian Organisasi

Secara etimologi organisasi asal katanya yakni “*organum*” maknanya adalah alat. Sedangkan “*organize*” (bahasa Inggris) artinya mengorganisasikan yang mengarah pada sebuah tindakan maupun usaha untuk mencapai suatu tujuan. “*Organizing*” (pengorganisasian) adalah proses agar dapat mencapai sesuatu. Para ahli telah banyak mendefinisikan organisasi yang menjadi salah satu fungsi dari manajemen.<sup>1</sup> Organisasi merupakan segala bentuk kerjasama yang terdiri dari dua orang atau lebih yang memiliki kesamaan tujuan serta berkaitan secara formal pada persekutuan. Hubungan antara seseorang yang disebut sebagai pemimpin dengan suatu kelompok akan selalu ada dalam hal ini yang yang bertugas membantu pimpinan sesuai dengan perannya masing-masing.

Organisasi dalam hal ini memiliki pengertian umum yang dibagi menjadi dua. Pertama, organisasi yang artinya menjadi sebuah lembaga maupun kelompok yang fungsional, contohnya sekolah, perusahaan, sampai badan pemerintahan. Kedua, mengarah pada proses pengorganisasian yakni mengatur dan mengalokasikan pekerjaan dari para anggota, agar mampu mencapai tujuan dari organisasi secara efektif. Kemudian organisasi itu sendiri memiliki arti suatu perkumpulan yang melakukan kerjasama dan memiliki tujuan yang sama untuk dicapai. Pemahaman terhadap apa yang harus dilakukan oleh setiap anggota terhadap kelompok akan menimbulkan suatu organisasi dan kerja sama, serta fungsi masing-masing orang di dalam kelompok tersebut.<sup>2</sup> Dydiet Hardjito menjelaskan organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar yang memungkinkan anggota mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai melalui individu secara terpisah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Hasbiyallah dan Nayif Sujudi, “*Pengelolaan Pendidikan Islam: Teori dan Praktik*”, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019) 42.

<sup>2</sup>Hasbiyallah dan Nayif Sujudi, “*Pengelolaan Pendidikan Islam Teori dan Praktik*”, 43.

<sup>3</sup>Hasbiyallah dan Nayif Sujudi, “*Pengelolaan Pendidikan Islam Teori dan Praktik*”, 44.

b. Organisasi Pendidikan

Tujuan pendidikan dapat tercapai dengan menggunakan lembaga pendidikan sebagai alatnya. Pendidikan merupakan sebuah usaha yang sifatnya mendidik, membimbing, membina, sampai mengarahkan menggunakan ilmu pengetahuan. Tempat untuk melaksanakan pendidikan dapat dilakukan didalam keluarga, sekolah, pondok pesantren dan lingkungan masyarakat.<sup>4</sup>

Rechey dalam bukunya, *Planning for Teachig, an Introduction*, menjelaskan pengertian pendidikan sebagai berikut: “*The term “education” refers to the board function of preserving and improving the life of the group trough bringing new members than that which occurs in schools. It is an essencial social activity by which communities continue to exist. In complex communities this function is specialized and institutionalized in formal education, but there is always the education outside the school with which the formal process in related.* Pendidikan memiliki istilah yang ada kaitannya dengan fungsi yang luas dari perbaikan dan pemeliharaan pada suatu kehidupan masyarakat utamanya untuk mengenalkan generasi muda berkaitan dengan kewajiban serta tanggung jawab dalam masyarakat. Dengan demikian proses pendidikan jauh lebih luas dibandingkan dengan belajar mengajar yang diselenggarakan di sekolah.<sup>5</sup>

Dalam bahasa Arab, Istilah pendidikan disebut dengan *tarbiyah*, *ta’lim*, dan *ta’dib*. *Tarbiyah* memiliki arti pertumbuhan dan perkembangan. *Ta’lim* memiliki arti pengajaran, yakni pengajaran yang bersifat penyampaian ilmu pengetahuan. *Ta’dib* memiliki arti sopan santun, yakni proses mendidik yang difokuskan kepada pembinaan dan penyempurnaan akhlak atau budi pekerti.<sup>6</sup>

Dalam konteks organisasi yang menjadi salah satu bentuk upaya yang dikerjakan adalah pendidikan, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat atau lainnya. Tujuan pendidikan merupakan salah satu tujuan utama yang harus dicapai. Penggunaan pendekatan organisasi yang dilaksanakan akan lebih efektif dan efisien untuk mecapai tujuan tersebut.

---

<sup>4</sup>Hikmat, “*Manajemen Pendidikan*”, (Bandung: Buku Online, 2009), 11.

<sup>5</sup>Hikmat, “*Manajemen Pendidikan*”, 12.

<sup>6</sup>Hikmat, “*Manajemen Pendidikan*”, 14.

Pada masa sekarang, organisasi pendidikan merupakan dari salah satu organisasi formal yang mampu memberikan bekal terhadap putra putri untuk masa depan yang dapat dipercaya dan diharapkan.

Sekolah sebagai organisasi memiliki dua sisi yang dapat dilihat, ialah suatu tempat dijalankannya proses pendidikan dan organisasi secara formal dengan kesamaan tujuannya yakni tujuan pendidikan sekolah. Sebuah organisasi yang menyelenggarakan pendidikan melihat bahwa adanya organisasi pendidikan diharapkan lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan.<sup>7</sup>

Kesimpulannya dapat diartikan bahwa organisasi merupakan suatu tempat atau sistem yang dapat bersama-sama mengerjakan kegiatan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Sementara pengorganisasian adalah suatu proses dalam membentuk tempat atau sistem dan penyusunan anggota berbentuk struktur organisasi sehingga bertujuan agar tujuan organisasi dapat tercapai. Selanjutnya apabila dikaitkan dengan pendidikan, organisasi pendidikan merupakan tempat beraktifitas yang berkaitan dengan pendidikan agar tujuan pendidikan yang telah diinginkan dapat tercapai. Sedangkan pengorganisasian pendidikan merupakan suatu proses terbentuknya tempat dan sistem untuk dapat melakukan suatu kegiatan pendidikan agar tujuan pendidikan tersebut tercapai.<sup>8</sup>

Dalam hal ini, organisasi pendidikan diklasifikasikan dalam organisasi madrasah dan organisasi pondok pesantren sebagai berikut:

#### 1. Konseptualisasi Organisasi Madrasah

Madrasah dikatakan suatu organisasi, karena madrasah mempunyai struktur yang formal dengan batasan-batasan sistem yang jelas. Sebagai organisasi sosial yang dinamis dan progresif, madrasah mengembangkan organisasi yang bersifat organik dan mekanik secara sinergis. Dengan demikian, madrasah dapat dikategorikan sebagai sekolah yang menerapkan sumber mekanis, karena dalam pelaksanaannya memiliki

---

<sup>7</sup>Hasbiyallah dan Nayif Sujudi, “*Pengelolaan Pendidikan Islam: Teori dan Praktik*”, 54.

<sup>8</sup>Hasbiyallah dan Nayif Sujudi, “*Pengelolaan Pendidikan Islam: Teori dan Praktik*”, 55.

ciri-ciri birokrasi yang tinggi. Dikatakan menerapkan model organis, karena madrasah tidak menggunakan semua ketentuan-ketentuan organisasi secara ketat dan linear bahkan madrasah menggunakan pendekatan sosiologis dan strategi yang efektif untuk membantu merespon terhadap perubahan yang ada.<sup>9</sup>

## 2. Organisasi Pondok Pesantren

Keberadaan pesantren di Indonesia dengan mengadopsi sistem pendidikan keagamaan yang telah lama berkembang dan diakui memiliki andil yang sangat besar bagi bangsa.

Pondok pesantren pada masa alanya memiliki organisasi dan manajemen yang sangat sederhana.. Peraturan pondok pesantren seluruhnya diambil alih oleh santri dan Kyai terbatas pada pengawasan yang diam. Seiring berjalannya waktu, pondok pesantren mulai menggunakan prinsip-prinsip organisasi dan manajemen sebagaimana dipergun akan dalam pendidikan formal meski tidak sama persis. Oleh karena itu, Departemen Agama RI menyusun buku panduan Administrasi Pesantren untuk membantu pesantren dalam mengelola organisasi pesantren.<sup>10</sup>

Musthofa Syarif, BA., dalam bukunya Administrasi Pesantren menguraikan bahwa pesantren memiliki tujuan umum yaitu membimbing warga agar memiliki kepribadian seorang muslim yang sesuai atas ajaran agama Islam dan menumbuhkan rasa beragama disetiap kehidupan, serta menjadikannya orang yang bermanfaat untuk agama, masyarakat dan negara.<sup>11</sup>

Proses pengorganisasian di pondok pesantren diperlukan parameter dari aspek-aspek pengorganisasian dalam manajemen modern. Organisasi pesantren dikategorikan solid apabila prinsip-prinsip tersebut meliputi penetapan tujuan yang jelas, kesatuan perintah, keseimbangan, pendistribusian pekerjaan, rentang pengawasan, prinsip pelimpahan wewenang, prinsip departementasi, prinsip pengamatan pegawai yang tepat,

<sup>9</sup>M Ikhsan Nawawi, "Madrasah dan Pesantren sebagai Organisasi", 13.

<sup>10</sup>M Ikhsan Nawawi, "Madrasah dan Pesantren sebagai Organisasi", 17.

<sup>11</sup>M Ikhsan Nawawi, "Madrasah dan Pesantren sebagai Organisasi", 17.

prinsip koordinasi, serta prinsip pemberian balas jasa yang memuaskan.<sup>12</sup>

c. Tujuan dan Manfaat Organisasi Pendidikan

Pengelolaan pendidikan yang menjadi sebuah organisasi harus diperhatikan secara teliti sehingga aktifitas dalam melaksanakan program organisasi bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Berikut ini merupakan manfaat dan tujuan organisasi pendidikan:<sup>13</sup>

- 1.) Keterbatasan kemampuan, kemauan dan sumber daya yang ada akan teratasi agar tujuan pendidikan dapat tercapai.
- 2.) Menciptakan efektifitas dan efisiensi organisasi agar tujuan pendidikan dapat tercapai.
- 3.) Menjadi tempat untuk mengembangkan potensi dan spesialisasi yang telah dimiliki.
- 4.) Menjadi tempat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, dan sebagainya.

Menurut O'Connor T. Empat komponen utama harus dimiliki dalam organisasi yakni *mission* (misi), *goals*(tujuan), *objectives* (sasaran) dan *behavior* (perilaku). *Mission* merupakan dasar utama adanya organisasi tersebut. *Goals* merupakan suatu tujuan utama yang berhubungan dengan *stakeholders* organisasi. *Objectives* adalah sasaran/hasil yang spesifik, terukur dan terkait dengan tujuan. Adapun *behaviors* mengarah pada produktivitas dari tugas-tugas rutin pegawai.<sup>14</sup>

## 2. Pengorganisasian dan Sinergitas

### a. Fungsi pengorganisasian

Fungsi *organizing* adalah proses yang dijalani guna menyiapkan atau menyusun suatu organisasi. Struktur garis wewenang dan koordinasi pada setiap satuan organisasi akan dijelaskan dalam bagan struktur organisasi. Menurut Drawis dalam fungsi pengorganisasian adalah sebagai berikut: (1) Memberi deskripsi pekerjaan pada tugas pelaksanaan, (2) melakukan klasifikasi pada tugas pelaksanaan dalam

<sup>12</sup>M Ikhsan Nawawi, "Madrasah dan Pesantren sebagai Organisasi", 20.

<sup>13</sup>Hasbiyallah dan Nayif Sujudi, "Pengelolaan Pendidikan Islam Teori dan Praktik", 56.

<sup>14</sup>Hasbiyallah dan Nayif Sujudi, "Pengelolaan Pendidikan Islam Teori dan Praktik", 57.

pekerjaan operasional, (3) menghubungkan dan mengelola kelompok pekerjaan operasional dalam kesatuan, (4) Menentukan persyaratan pekerjaan, (5) mengatur individu pada pekerjaan yang tepat, (6) memberikan delegasi otoritas yang pantas dalam seluruh manajemen, (7) memfasilitasi pekerjaan, (8) Pengorganisasian sebagai manajemen.<sup>15</sup>

b. Proses Pengorganisasian

Proses pengorganisasian memiliki tujuan memperkecil suatu kegiatan yang besar, memudahkan manajer dalam mengawasi, serta orang yang dapat melaksanakan tugas yang telah ditentukan dapat ditemukan. Proses *organizing* yang harus dilaksanakan oleh manajer sesuai dengan rencana kerja atau petunjuk pelaksanaan kerja.

Menurut Drs. Malayu S.P. Hasibuan, proses pengorganisasian diantaranya memberi batasan batasan dan menjumlahkan tugas, mengelompokkan dan mengklasifikasikan tugas serta mendelegasikan wewenang antara karyawan dengan perusahaan.<sup>16</sup>

c. Sinergitas

Sinergitas atau kerjasama merupakan usaha-usaha dalam menggapai tujuan bersama melalui kesatuan yang mengarah untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam ranah pendidikan, hubungan kerjasama adalah melaksanakan seluruh kegiatan yang dijalankan oleh beberapa pihak yang sejajar kedudukannya dan memberikan keuntungan bagi seluruh pihak untuk dapat mencapai suatu tujuan dengan menggunakan prinsip kerjasama. Sinergitas menghasilkan banyak hal, salah satunya menciptakan suasana saling menghargai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya akan lebih maksimal juga efisien. Prinsip-prinsip sinergitas diantaranya adalah:

1. Bersifat memperkuat dan saling menguntungkan
2. Melahirkan pengertian dan kesepakatan yang akan memberi manfaat bagi keduanya

---

<sup>15</sup>Ramadhani Harahap, "Pengorganisasian Gugus Depan Pramuka Universitas Riau", *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau* 4, No. 2, 6.

<sup>16</sup>Ramadhani Harahap, Pengorganisasian Gugus Depan Pramuka Universitas Riau, 7.

3. Memberi dampak yang lebih besar dalam mengantisipasi berbagai ancaman dalam melakukan kerjasama.<sup>17</sup>

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, dalam bersinergi diperlukan hubungan harmonis dan kebersatuan arah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kaitannya dengan sinergitas pengelolaan madrasah dan pondok pesantren, keharmonisan serta kerjasama yang terarah sangat diperlukan untuk mencapai tujuan yakni terlaksananya pendidikan yang berkualitas dan melahirkan generasi unggul.

### 3. Manajemen Pendidikan

#### a. Manajemen Pendidikan Sekolah/Madrasah

Manajemen pendidikan merupakan pengelolaan kepada seluruh kebutuhan institusional di ranah pendidikan secara efektif dan efisien. Manajemen pendidikan ini menjadi salah satu komponen dari keseluruhan sistem dimana terdapat kaitannya antara sub sistem satu dengan lainnya. Manajemen pendidikan ialah aktifitas-aktifitas untuk mencapai satu tujuan yang telah ditetapkan dalam pendidikan.<sup>18</sup>

Manajemen pendidikan sesungguhnya memiliki hakekat sebagai beberapa usaha yang ada hubungannya dengan aktifitas pendidikan yang didalamnya mengalami suatu proses mempengaruhi, memotivasi kreatifitas peserta didik dengan memanfaatkan seluruh alat pendidikan, metode, sarana dan prasarana serta media yang diperlukan dalam melaksanakan pendidikan.<sup>19</sup>

Penerapan manajemen sangat erat hubungannya dengan keberhasilan lembaga pendidikan. Manajemen merupakan makna universal yang diambil dari seni dan ilmu untuk menjalankan fungsi perencanaan, pengendalian, pengawasan, personalia, serta profesionalitas. Maka dari itu, dapat diartikan bahwa manajemen pendidikan adalah suatu proses yang dilakukan terus menerus oleh suatu organisasi pendidikan dengan melewati fungsionalisasi unsur-unsur

---

<sup>17</sup>Muhammad Baidowi, "Sinergitas Guru Aqidah Akhlak dan Guru Fiqih dalam Membiasakan Kedisiplinan Sholat Berjamaah Peserta Didik MTs Darussalam Gayau Sakti Kec. Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah", (Skripsi, IAIN Metro, 2018), 38.

<sup>18</sup>Hikmat, "*Manajemen Pendidikan*", 16.

<sup>19</sup>Hikmat, "*Manajemen Pendidikan*", 17.

manajemen yang ada, yang didalamnya memiliki upaya untuk saling mempengaruhi, mengarahkan serta mengawasi sehingga semua aktifitas dan kinerja organisasi pendidikan mampu tercapai sesuai dengan tujuannya.

Pengarahan yang dijalankan ada kaitannya terhadap pengertian manajemen pendidikan ialah memberikan pengarahan kepada pihak terkait supaya melaksanakan aktifitas kependidikan sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Segenao elemen diberikan arahan agar mampu mengelola sarana dan prasarana pendidikan, alat-alat pendidikan, metode, desain kurikulum, kesekretariatan, kebidaharaan serta mengatur strategi pendidikan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.<sup>20</sup>

Letak dari hakekat manajemen pendidikan terdapat pada pengelolaan kependidikan, yakni pengelolaan lembaga pendidikan yang merupakan sistem. Maka dari itu yang harus dikelola secara keseluruhan adalah:<sup>21</sup>

1. Kinerja dari seluruh pegawai lembaga pendidikan
2. Administrasi kegiatan pendidikan
3. Kegiatan seluruh pendidik
4. Kurikulum pendidikan
5. Sistem pembelajaran dan metode mengajar
6. Pengawasan dan supervisi pendidikan
7. Evaluasi pendidikan
8. Pembiayaan pelaksanaan dari segi fasilitas sarana dan prasarana pendidikan<sup>22</sup>

Berkaitan dengan pengertian manajemen pendidikan yang menjadi proses pengelolaan dan pembinaan dalam kelembagaan pendidikan, didalamnya tersirat juga mengenai tugas-tugas para pendidik, yaitu:

- Melakukan pengelolaan yang artinya memberikan bimbingan
- Melakukan pengelolaan dengan maksud menumbuhkan suasana mendidikan yang memiliki tujuan
- Melakukan pengelolaan dengan maksud mengembangkan kecerdasan seluruh pendidik

---

<sup>20</sup>Hikmat, “*Manajemen Pendidikan*”, 15.

<sup>21</sup>Hikmat, “*Manajemen Pendidikan*”, 14.

<sup>22</sup>Hikmat, “*Manajemen Pendidikan*”, 15.



- Melakukan pengelolaan dengan maksud kemajuan dan peningkatan lembaga pendidikan yang dilaksanakan dengan kerjasama seluruh *civitas* akademik
- Melakukan pengelolaan dengan maksud menngembangkan dan memahamkan tentang dasar bakat serta minat peserta didik
- Melakukan pengelolaan dengan maksud menyalurkan dan mengembangkan profesionalitas anak didik terhadap kehidupan bermasyarakat.<sup>23</sup>

b. Manajemen Pendidikan dalam Pondok Pesantren

Manajemen yang mulanya telah digunakan di dunia bisnis, ketika digunakan pada dunia pendidikan islam pastinya akan dapat digunakan dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Sebagai ilmu tata kelola, pasti sangat banyak yang bisa dimanfaatkan oleh berbagai aktifitas pengelolaan organisasi, termasuk organisasi atau lembaga pendidikan Islam dan pondok pesantren.<sup>24</sup> Berikut ini merupakan fungsi-fungsi manajemen pada lembaga pendidikan pondok pesantren, diantaranya:

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang akan dikerjakan dimasa mendatang agar tujuan dapat tercapai. Perencanaan memiliki berbagai unsur dengan jumlah kegiatan yang telah ditentukan, terdapat proses, hasil yang akan dipenuhi atau dicapai serta mengarah pada masa depan di waktu tertentu.

Untuk pondok pesantren, sangat besar manfaat dari rencana jangka panjang. Perencanaan sangat berdampak pada penggarapan perlengkapan fisik (sarana dan prasarana) serta nonfisik (pendidikan) dalam keseharian dipercaya akan menjadi lebih baik, mengarah serta sasarannya tepat jika dibandingkan dengan bekerja jalan saja, tidak memiliki cita-cita, dan tujuan yang tidak terarah. Bila tidak ada perencanaan yang baik, tidak menutup kemungkinan jika organisasi akan berjalan ditempat tanpa perkembangan, akan salah memilih jalan karena mudah terbawa arus. Visi, misi, dan tujuan menjadi salah satu penjabaran dari perencanaan di

<sup>23</sup> Hikmat, "Manajemen Pendidikan", 18.

<sup>24</sup> Ahmad Janan Asifudin, "Manajemen Pendidikan untuk Pondok Pesantren", *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, No. 2, (2016), 364.

lembaga pendidikan pondok pesantren.<sup>25</sup> Sedangkan dalam memutuskan program yang jangka panjang maupun menengah para alumni yang mungkin berkompeten, pakar, ulama serta tokoh-tokoh masyarakat sebaiknya diundang juga peran pengurus serta pimpinan pondok itu sendiri untuk bersama-sama menyusun rencana strategis (RENSTRA), sehingga dengan perumusan yang matang pondok pesantren memiliki acuan dalam penyusunan program-program tahunan.

## 2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Seperti yang sudah tertera dalam penjelasan sebelumnya, organisasi adalah sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi memiliki salah satu tujuan dan manfaat yakni mampu menangani keterbatasan kemampuan antar individu, tujuan akan tercapai dengan lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bersama-sama, menjadi tempat segala macam potensi dan teknologi, spesialisasi, kepentingan serta kebutuhan bersama yang kompleks, mendapatkan suatu penghargaan dan keuntungan, dan lain sebagainya.

Terkait dengan pengorganisasian dalam pondok pesantren, diberlakukannya Undang-Undang Yayasan Tahun 2001 dan 2004 serta diimplementasikan pada 2007, memberikan peluang kepada pondok pesantren untuk mengkonstruksi manajemennya, sehingga manajemen dapat diterapkan sebagaimana mestinya, yakni sesuai dengan ilmu serta kode etik manajemen yang lazim.<sup>26</sup>

Dalam organisasi sumber daya manusia ditempatkan dan diperdayakan dengan berusaha secara sungguh-sungguh menerapkan *the right man on the right place* serta pembinaan dan pengembangan melalui pengarahan, penataran, diklat ataupun disekolahkan.<sup>27</sup>

## 3. Pengarahan dan Penggerakan (*Directing, Actuating*)

Pengarahan pada umumnya mengarah ke *motivating, actualizing, action, moderating*, penggerakan dan lain sebagainya. Pengarahan dan penggerakan dengan rapat adalah cara formal yang sering dilakukan,

<sup>25</sup>Ahmad Janan Asifudin, Manajemen Pendidikan untuk Pondok Pesantren, 359.

<sup>26</sup>Ahmad Janan Asifudin, Manajemen Pendidikan untuk Pondok Pesantren, 360.

<sup>27</sup>Ahmad Janan Asifudin, Manajemen Pendidikan untuk Pondok Pesantren, 360.

memiliki wibawa dan sangat aman, sebab keputusan yang diambil secara bersama. Pergerakan juma bisa dilaksanakan oleh pimpinan pondok pesantren dengan cara instruksi. Akan tetapi, hal ini akan dikeluarkan jika ada urusan yang sangat penting dan sifatnya khusus dalam bentuk pembinaan, pemberian motivasi, mengarahkan dan lain-lain.

Manajemen yang diterapkan di pondok pesantren secara dasar seluruh cara penggerakan diatas mampu diaplikasikan, yang pasti dengan segala kemungkinan sebab adanya pertimbangan kultural.

#### 4. Pengontrolan (*Controlling*)

Obyek pengontrolan dan pengawasan meliputi seluruh aktifitas yang dikerjakan manajer untuk mencari kepastian bahwa hasil aktual telah sama dengan hasil yang sebelumnya ditentukan. Pelaksanaan *controlling* biasa dilaksanakan secara formal maupun non formal, misal dari pelaksanaan yang formal ialah dengan menggunakan laporan rutin atau laporan pertanggungjawaban di akhir taun. Pelaksanaan dan penjabaran progam serta anggaran menjdi salah satu fokus utamanya. Adapula yang nonformal diluar rapat dan diluar program dan anggaran bila dipandang perlu dan proporsioanal. Pengontrlan secara rahasia juga mungkin diadakan bila diperlukan.<sup>28</sup>

#### 4. Bidang Garapan Manajemen Pendidikan

Tinjauan manajemen pendidikan ditinjau dari bidang garapnya yang titik tolaknya pada aktifitas “dapur inti”, yakni program pembelajaran didalam kelas yang kurang lebih terdapat 8 (delapan) bidang garapan manajemen, diantaranya manajemen peserta didik, kurikulum, personalia, sarana dan prasarana, pembiayaan pendidikan, ketatalaksanaan, organisasi serta humas. Supervisi pendidikan menjadi garapan lain diluar kedelapan garapan bidang diatas.<sup>29</sup>

##### a. Manajemen Kurikulum

Manajemen kurikulum menjadi salah satu bidang gararapn manajemen pendidikan yang terpenting, undang-

<sup>28</sup>Ahmad Janan Asifudin, Manajemen Pendidikan untuk Pondok Pesantren, 362.

<sup>29</sup>Siti Farikhah, “*Manajemen Lembaga Pendidikan*”, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), 36.

undang sisdiknas menjadi dasar kurikulum sebagai alat agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai. Dan dalam arti yang lebih khusus, kurikulum merupakan instrumen dalam rangka meraih tujuan institusional sesuai dengan ragam dan jenjang pendidikan.<sup>30</sup>

Pengelolaan atau manajemen kurikulum ialah suatu sistem pengelolaan yang kooperatif, komprehensif, dan sistematis untuk mencapai tujuan kurikulum. Pada pendidikan Nasional, pengelolaan kurikulum wajib dikembangkan sesuai dengan konteks manajemen yang basisnya madrasah. Sedangkan prinsip dalam melaksanakan pengelolaan kurikulum meliputi tujuan, isi, metode serta evaluasi. Seluruh komponen tersebut harus saling berkaitan. Jika ada salah satu komponen yang terganggu atau tidak sesuai, maka sistem kurikulum akan terganggu.<sup>31</sup>

Adapun manajemen kurikulum mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum tersebut.<sup>32</sup> Berikut merupakan aktifitas dari tahapan yang ada dalam pengelolaan kurikulum:

#### 1. Perencanaan

Perencanaan kurikulum adalah suatu proses yang didalamnya terdapat kegiatan pengumpulan, penyortiran, sintesis dan seleksi informasi yang relevan dari segala macam sumber. Pengalaman-pengalaman belajar dirancang dan didesain dengan menggunakan informasi ini sehingga tujuan belajar dapat dicapai oleh peserta didik.<sup>33</sup>

#### 2. Pengorganisasian Kurikulum

Pengorganisasian kurikulum memiliki suatu perbedaan dengan organisasi kurikulum. Pengorganisasian kurikulum adalah sebuah upaya dalam menyinkronkan dan mengelola seluruh program kurikulum pendidikan sehingga kegiatan belajar mengajar dapat diimplementasikan secara maksimal.<sup>34</sup>

---

<sup>30</sup>Siti Farikhah, "Manajemen Lembaga Pendidikan", 55.

<sup>31</sup>Ara Hdayat dan Imam Machali, *Pengelolaan Pendidikan*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2012), 148.

<sup>32</sup>Siti Farikhah, "Manajemen Lembaga Pendidikan", 57.

<sup>33</sup>Agus Zainul Fitri, *Kurikulum Pendidikan Islam: Dari Normatif-Filosofis ke Praktis*, (Bandung: Alfabeta 2013) 3.

<sup>34</sup>Agus Zainul Fitri, *Kurikulum Pendidikan Islam*, 34.

Pendekatan manajemen dan akademik dapat dilakukan untuk meninjau pengorganisasian kurikulum. Pengerian dari kata organisasi itu sendiri adalah suatu kelompok sosial yang sifatnya tertutup atau terbuka untuk pihak dari luar yang aturannya ditentukan oleh seorang pimpinan yang dapat melaksanakan bimbingan secara teratur atau bertujuan.<sup>35</sup> Dalam sebuah organisasi sangat diperlukan untuk melaksanakan proses manajemen, yakni:

- Organisasi perencanaan kurikulum.
- Organisasi dalam rangka implementasi kurikulum.
- Organisasi dalam tahap evaluasi kurikulum.<sup>36</sup>

### 3. Pelaksanaan

Implementasi kurikulum adalah sebuah proses untuk menerapkan suatu ide, konsep, kebijakan atau inovasi pendidikan islam pada tindakan praktis yang nantinya berdampak baik pada perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, sikap, moral serta akhlak. Implementasi kurikulum dapat dimaksud menjadi aktualisasi kurikulum tertulis pada pembelajaran..<sup>37</sup> Pelaksanaan kurikulum merupakan tindakan nyata dari apa yang sudah direncanakan, adanya keberhasilan dari pelaksanaan merupakan suatu wujud nyata dari apa yang direncanakan. Sesuai firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 135:<sup>38</sup>

قُلْ يٰقَوْمِ اَعْمَلُوا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَمِلٌ

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُوْنُ لَهُ عَقِبَةُ الدّٰرِ

اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), “Wahai kaumku!  
Berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun

<sup>35</sup>Agus Zainul Fitri, *Kurikulum Pendidikan Islam*, 35.

<sup>36</sup>Agus Zainul Fitri, *Kurikulum Pendidikan Islam*, 35.

<sup>37</sup>Agus Zainul Fitri, *Kurikulum Pendidikan Islam*, 39.

<sup>38</sup>Alquran, Al-An'am ayat 135, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Maghfirah Pustaka, 2006), 145.

*berbuat (demikian). Kelak kamu akan mengetahui, siapa yang akan memperoleh tempat (terbaik) di akhirat (nanti).*

#### 4. Evaluasi

Evaluasi adalah suatu komponen kurikulum dengan pengertian terbatas, evaluasi kurikulum disini bermaksud agar dapat melihat seberapa besar pencapaian suatu tujuan pendidikan yang akan diwujudkan dengan menggunakan kurikulum yang bersangkutan. Evaluasi dilaksanakan agar kemampuan peserta didik dapat diketahui pada hasil dari suatu proses pendidikan yang dilaksanakan di sekolah ataupun madrasah. Peran dari evaluasi kurikulum sangatlah penting sebagai penentu kebijakan pendidikan secara umum atau dalam mengambil keputusan pada kurikulum tersebut. Pemegang kebijakan dan pengembang kurikulum dapat menggunakan hasil evaluasi untuk menentukan dan menetapkan kebijakan untuk pengembangan sistem pendidikan serta model kurikulum yang akan dipakai.<sup>39</sup>

#### b. Manajemen Peserta Didik

Manajemen peserta didik adalah salah satu kegiatan dalam manajemen pendidikan yang bersangkutan dengan peserta didik yang berwujud sebagai pengelolaan peserta didik maupun data dari peserta didik mulai dari awal masuk hingga selesai menumpuh pendidikan.<sup>40</sup> Cakupan manajemen peserta didik meliputi pengelolaan penerimaan peserta didik baru, bimbingan serta penyuluhan, pengelola Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan data peserta didik.<sup>41</sup>

Fungsi manajemen peserta didik ialah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin bagi individualitas, sosial, aspirasi, kebutuhan serta potensi-potensi lainnya.<sup>42</sup> Pengelolaan atau manajemen peserta didik merupakan sub aspek penting setelah peserta

<sup>39</sup> Agus Zainul Fitri, *Kurikulum Pendidikan Islam*, 43.

<sup>40</sup> Siti Farikhah, "Manajemen Lembaga Pendidikan", 38.

<sup>41</sup> Siti Farikhah, "Manajemen Lembaga Pendidikan", 39.

<sup>42</sup> Jaja Jahari, Manajemen Peserta Didik, *Jurnal Islamic Education Manajemen* (3), No. 2, 2018. 172.

didik masuk dalam lingkungan pendidikan. Proses pembinaan, disiplin peserta didik yang dalam hal ini merupakan proses pembinaan peserta didik agar dapat dilaksanakan proses pendidikan secara maksimal. Lembaga pendidikan sekolah dalam pembinaan peserta didik salah satunya melalui jalur kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan kurikuler merupakan seluruh kegiatan yang telah ditentukan didalam kurikulum yang pelaksanaannya dalam bentuk proses belajar mengajar di kelas dengan bidang studi yang ada di sekolah/madrasah. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan peserta didik yang dilaksanakan diluar ketentuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Ekstrakurikuler biasanya terbentuk berdasarkan minat dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik.<sup>43</sup>

### c. Manajemen Personalia

Istilah manajemen personalia juga disebut juga dengan manajemen sumber daya manusia. Manajemen personalia atau manajemen sumber daya manusia memiliki makna menjadi suatu ilmu yang memahami bagaimana cara memenuhi fasilitas untuk perkembangan dan partisipasi pegawai dalam satu unit kegiatan. Manajemen personalia atau manajemen sumber daya manusia yang dimaksud pada bahasan ini ialah manajemen pendidik dan tenaga kependidikan yang menjadi seorang penyelenggara dalam program pendidikan di sekolah.<sup>44</sup> Dimana tugas sebagai tenaga kependidikan telah tercantum di dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39.<sup>45</sup> Serta dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 pasal 1 yang menjelaskan bahwa guru merupakan pendidik profesional yang memiliki tugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, melatih, mengarahkan, menilai serta mengevaluasi peserta didik.

Proses manajemen personalia di sekolah khususnya meliputi tahap-tahap pengadaan, penempatan, pemeliharaan, pembinaan dan pemhembangan, pemutusan hubungan kerja dan pensiun.<sup>46</sup> fungsi dari manajemen sumber daya manusia

---

<sup>43</sup>Jaja Jahari, Manajemen Peserta Didik, Jurnal Islamic Education Manajemen (3), No. 2, 2018. 173.

<sup>44</sup>Siti Farikhah, "Manajemen Lembaga Pendidikan", 71.

<sup>45</sup>Siti Farikhah, "Manajemen Lembaga Pendidikan", 72.

<sup>46</sup>Siti Farikhah, "Manajemen Lembaga Pendidikan", 74.

pada umumnya tidak ada bedanya dengan fungsi manajemen umum yakni meliputi fungsi manajerial dan operasional.

Seluruh fungsi tersebut akan dikerjakan sesuai pada kebutuhan, pelaksanaan tersebut dapat secara sederhana maupun secara lebih mendalam. Dan dalam melaksanakan tugas manajerial, kerjasama antar pekerja tidak dapat dilepaskan serta pelaksanaannya secara *step by step of doing something*.<sup>47</sup>

d. Manajemen Sarana dan Prasarana

Unsur yang mendirikan manajemen sarana dan prasarana ialah sarana dan prasarana. Mulyasa mengungkapkan bahwa sarana pendidikan merupakan sarana peralatan serta perlengkapan yang digunakan secara langsung dan membantu jalannya proses pembelajaran, misalnya alat tulis, papan tulis dan berbagai macam media pembelajaran. Kemudian prasarana pendidikan ialah fasilitas yang membantu berjalannya kegiatan pembelajaran secara tidak langsung misalnya ruang kelas, kamar madi dan lainnya.<sup>48</sup>

Manajemen sarana dan prasarana adalah suatu kegiatan yang akan mengontrol sarana dan prasarana pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Maka dari itu, manajemen ini merupakan kerjasama untuk memperdayakan seluruh sarana dan prasarana pendidikan yang telah disediakan oleh pihak sekolah dengan lebih efektif dan efisien. Adapun manajemen sarana dan prasarana memiliki tugas untuk mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan supaya bisa berkontribusi secara optimal dan berarti dalam kelangsungan proses pendidikan sehingga tujuan pendidikan tersebut dapat tercapai.<sup>49</sup>

e. Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Manajemen pembiayaan pendidikan adalah salah satu unsur terpenting untuk menyelenggarakan pendidikan, tanpa adanya biaya yang menopangnya proses pendidikan tidak akan terlaksana secara baik. Manajemen ini sangat

---

<sup>47</sup>M. Nazar Almasri, "Manajemen Sumber Daya Manusia: Implementasi dalam Pendidikan Islam", *Jurnal Khutubkhanah* 19, No. 2, 2017. 139.

<sup>48</sup>Siti Farikhah, "Manajemen Lembaga Pendidikan", 82.

<sup>49</sup>Siti Farikhah, "Manajemen Lembaga Pendidikan", 82.



berbeda dengan yang ada di pembiayaan perusahaan yang mana orientasinya mengarah pada profit dan laba. Organisasi pendidikan digolongkan menjadi publik tanpa profit. Oleh karenanya, keunikan yang dimiliki oleh manajemen pembiayaan akan sesuai dengan misi dan karakteristik pendidikan.<sup>50</sup>

Dasar dari manajemen pembiayaan pendidikan adalah suatu kegiatan yang berhubungan pada sumber, penggunaan serta pertanggungjawaban dana pada suatu lembaga pendidikan. Kegiatan yang terdapat pada manajemen pembiayaan pendidikan diantaranya adalah merencanakan pembiayaan pendidikan atau menyusun anggaran, melaksanakan pembiayaan pendidikan atau membukukan serta mengawasi juga mempertanggungjawabkan.<sup>51</sup>

f. Manajemen Tata Usaha (Tata Laksana) Pendidikan

Tata usaha berperan sebagai unit kerja yang mendukung suatu organisasi sekolah yang memiliki kedudukan sangat penting dan strategis pada ketercapaian lembaga. Manajemen tata usaha yaitu kegiatan untuk mengelola teknis surat-menyurat sesuai dengan fungsinya mulai dari menerima atau menghimpun, mencatat, mengirim dan lain-lain.<sup>52</sup>

Kegiatan tata usaha sekolah memiliki ruang lingkup secara global diantaranya.<sup>53</sup>

1. Membuat program kerja
2. Mengelola keuangan sekolah
3. Mengurus manajemen ketenagaan dan peserta didik
4. Membina dan mengembangkan karier pegawai tata usaha sekolah
5. Menyusun manajemen perlengkapan sekolah
6. Menyusun dan menyajikan data/statistik sekolah
7. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebersihan, keamanan, kesehatan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan dan keseimbangan
8. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan

---

<sup>50</sup>Siti Farikhah, "Manajemen Lembaga Pendidikan", 91.

<sup>51</sup>Siti Farikhah, "Manajemen Lembaga Pendidikan", 92.

<sup>52</sup>Siti Farikhah, "Manajemen Lembaga Pendidikan", 100.

<sup>53</sup>Siti Farikhah, "Manajemen Lembaga Pendidikan", 101.

9. Mengurus manajemen persuratan
  10. Mengelola perpustakaan
  11. Mengelola laboratorium
  12. Mengelola tugas pokok pesuruh atau penjaga sekolah<sup>54</sup>
- g. Manajemen Hubungan Masyarakat

*Public school relation* merupakan terjemahan dari istilah hubungan sekolah dengan masyarakat yang memiliki makna hubungan timbal balik lembaga pendidikan dan masyarakat.

Maksud dari diadakannya kegiatan humas dalam sekolah bertujuan untuk menciptakan hubungan masyarakat baik internal maupun eksternal. Pada hubungan internal akan terlaksana komunikasi warga sekolah meliputi kepala sekolah, dewan guru, tenaga staf dan peserta didik. Kemudian hubungan eksternal adalah menciptakan hubungan komunikasi antara sekolah dengan masyarakat diluar.<sup>55</sup>

Pendidikan akan berhasil bukan sekedar hanya karena proses pembelajaran maupun ketersediaan sarana prasarana di sekolah, namun lingkungan keluarga serta masyarakat juga menentukan keberhasilan pendidikan di sekolah. Maka dari itu, pendidikan merupakan suatu tanggung jawab yang harus dilaksanakan bersama oleh pemerintah (sekolah), keluarga dan masyarakat. Tanggungjawab sabgai orangtua dan masyarakat adalah ikut memberikan partisipasinya, ikut dalam memikirkan dan membantu suksesnya penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Partisipasi orangtua peserta didik menjadi salah satu ciri suksesnya pengelolaan sekolah yang baik. Proses pendidikan yang melibatkan tingkat partisipasi masyarakat akan berpengaruh pada kemajuan sekolah.<sup>56</sup>

Maka dari itu sekolah harus senantiasa membangun komunikasi dengan masyarakat baik itu internal maupun eksternal sehingga mereka akan ikut serta dalam memikirkan dan mendukung sepenuhnya

---

<sup>54</sup>Siti Farikhah, “*Manajemen Lembaga Pendidikan*”, 102.

<sup>55</sup>Siti Farikhah, “*Manajemen Lembaga Pendidikan*”, 102.

<sup>56</sup>Siti Farikhah, “*Manajemen Lembaga Pendidikan*”, 108.

agar pendidikan sekolah menemukan kesuksesannya.<sup>57</sup>

Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang saling menguntungkan antara keduanya. Untuk sekolah informasi dan penjelasan dari masyarakat mampu membentuk opini terhadap sekolah. Bukan hanya itu, berbagai sumber daya masyarakat juga akan didapat sekolah yang bisa dimanfaatkan oleh sekolah untuk proses pembelajaran serta berbagai macam kegiatan lainnya. Masyarakat juga dapat memanfaatkan seluruh hasil pemikiran dan perkembangan pengetahuan dan teknologi dari sekolah.<sup>58</sup>

## 5. Kurikulum Madrasah dan Pondok Pesantren

Istilah kurikulum umumnya memiliki makna *plan for learning*. Kurikulum sebagai rencana pendidikan telah memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup, urutan isi dan proses pendidikan. Tahun 1856 istilah kurikulum diketahui pertama kalinya di dalam kamus *Webster (Webster Dictionary)* tahun 1856. Dunia olahraga awalnya yang menggunakan istilah ini yaitu sebuah alat yang mengantarkan seseorang dari garis stars sampai menuju finish. Selanjutnya dalam bidang pendidikan pada tahun 1955 telah menggunakan istilah kurikulum, yang artinya beberapa jumlah mata pelajaran dalam suatu perguruan.<sup>59</sup>

Kurikulum merupakan sekumpulan pengalaman pendidikan, kebudayaan, sosial, olahraga dan kesenian yang ditawarkan sekolah untuk peserta didik di dalam dan luar sekolah bertujuan untuk mengembangkan mereka secara menyeluruh pada semua segi serta mengubah tingkah laku mereka yang sesuai tujuan pendidikan.<sup>60</sup>

David Prediaux mengungkapkan bahwa kurikulum adalah hasil dari agen manusia. Itu didukung oleh serangkaian nilai dan keyakinan tentang apa yang harus diketahui siswa dan

---

<sup>57</sup>Siti Farikhah, “*Manajemen Lembaga Pendidikan*”, 109.

<sup>58</sup>Siti Farikhah, “*Manajemen Lembaga Pendidikan*”, 109.

<sup>59</sup>Heri Gunawan, “*Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*”, (Bandung: Alfabeta 2012) 1.

<sup>60</sup>Hasbiyallah dan Nayif Sujudi, “*Pengelolaan Pendidikan Islam Teori dan Praktik*”, 80.

bagaimana mereka bisa mengetahuinya.<sup>61</sup> Berikut ini kita akan melihat empat cara mendekati teori dan praktik kurikulum: 1) Kurikulum sebagai badan pengetahuan yang akan ditularkan, 2) Kurikulum sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu dalam diri siswa – produk, 3) Kurikulum sebagai proses, 4) Kurikulum sebagai praksis.

a. Kurikulum Madrasah

Dalam manajemen pendidikan kurikulum menjadi salah satu hal yang paling krusial. Manajemen kurikulum pendidikan Islam memiliki arti usaha yang sistematis yang dilaksanakan seseorang seseorang melalui aktifitas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang dilandasi dengan nilai-nilai Islam dengan harapan peserta didik dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien.<sup>62</sup>

Kurikulum dapat dilihat sebagai rencana kegiatan pembelajaa untuk peserta didik maupun sebagai perangkat tujuan yang akan dicapai. Kurikulum juga memiliki makna yang mengarah pada dokumen yang isinya tentang tujuan, bahan ajar kegiatan belajar mengajar, jadwal serta evaluasi. Kurikulum juga dapat digambarkan sebagai suatu dokumen yang ditulis dari hasil persetujuan oleh para penyusun kurikulum dan pemegang kebijakan pendidikan dengan masyarakat yang mencakup lingkup tertentu, baik dalam suatu sekolah, kabupaten, provinsi bahkan seluruh negara.<sup>63</sup>

Sebagai lembaga pendidikan dalam menjalankan fungsinya madrasah menggunakan kurikulum madrasah sebagai perangkatnya. Ditinjau dari segi fungsinya seluruh komponen tersebut saling berkaitan demi tercapainya suatu tujuan pendidikan tertentu.<sup>64</sup>

Madrasah harus berusaha dapat menjadi lembaga pendidikan yang unggul dan berkualitas dalam usaha menanamkan kekuatan moral pada peserta didiknya. Usaha

---

<sup>61</sup>Mark K Smih, “Curriculum Theory and Practice”, *The Encyclopedia Of Informal Education*, (2000), 1.

<sup>62</sup>Imam Mawardi, “Orientasi Ideal Manajemen Pengembangan Kurikulum Madrasah: Analisis Dasar Kebijakan Mutu Pendidikan Islam”, *Proceeding The 1st Annual Conference on Ilamic Education Management (ACIEM)*, (2018),4.

<sup>63</sup>Ahmad Saifuddin, “Eksistensi Kurikulum Pesantren dan Kebijakan Pendidikan”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3 No. 1, (2015), 2.

<sup>64</sup>Hendri Purbo Waseso, Pendidikan Kritis dan Rekonstruksi Kurikulum Madrasah”, *Wahana Akademika*, 3, No. 2, (2016), 6.

tersebut dapat tercapai diantaranya melalui penerapan visi dan misi, kurikulum yang baik, tata tertib serta program-program sosial yang mendidik.<sup>65</sup>

b. Pengelolaan Pondok Pesantren

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan islam yang terbentuk serta masyarakat telah mengakuinya dengan sistem berasrama dimana para santri mendapatkan pendidikan agama secara pengaja atau madrasah yang dengan penuh berada dibawah asuhan kyai yang memiliki kharismatis sebagai ciri khasnya serta independennya.

Pola kehidupan pesantren yang menjadi kebiasaan para santri dalam menjalani kegiatan sehar-hari disebut dengan istilah Panca Jiwa yang terdiri dari: jiwa keikhlasan, jiwa kesederhanaan, jiwa kemandirian, jiwa *ukhuwah islamiyah* dan jiwa kebebasan yang bertanggung jawab.<sup>66</sup>

Pesantren bisa juga dikatakan sebagai lembaga Islam yang non-formal, sebab pesantren membangun jalur pendidikannya sendiri dan umumnya tidak terikat dengan ketentuan dan kebijakan formal.<sup>67</sup> Sebagai bentuk respon dari perubahan kurikulum serta kebijakan pemerintah, maka pondok pesantren harus bersedia menggeser orientasi untuk mampu berkolaborasi dengan kurikulum sesuai dengan kebutuhan lembaganya.<sup>68</sup> Pada masa sekarang ini, pesantren dengan jenis serta corak pendidikan yang dilaksanakan dalam proses pencapaian tujuan instruksional diperlukan kurikulum.<sup>69</sup>

Berdasar pada tingkat konsistensi dengan sistem lama dan pengaruh dari sistem modern, pondok pesantren secara garis besar memiliki beberapa bentuk diantaranya:

1. Pondok pesantren *salafiyah*. Kata *salaf* memiliki arti lama, dahulu ataupun tradisional. Pondok pesantren

---

<sup>65</sup>Jejen Musfah, *Manajemen Pendidikan: Teori, Kebijakan dan Praktik*, (Jakarta: Prenamedia Group 2015), 263.

<sup>66</sup>Abdul Halim Soebahar, *Modernisasi Pesantren: Studi Transformasi Kepemimpinan Kiai dan Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jogjakarta: LkiS, 2013), 44-46.

<sup>67</sup>Ahmad Saifuddin, "Eksistensi Kurikulum Pesantren dan Kebijakan Pendidikan", 7-8.

<sup>68</sup>Ahmad Saifuddin, "Eksistensi Kurikulum Pesantren dan Kebijakan Pendidikan", 9.

<sup>69</sup>Khilod Junaidi, "Sistem Pendidikan Pondok Pesantren di Indonesia: Suatu Kajian Sistem Kurikulum di Pondok Pesantren Lirboyo", 2, No. 1 (2016), 10.

*salafiyah* merupakan pondok pesantren yang melaksanakan pembelajaran melalui pendekatan secara tradisional seperti yang sudah dijalankan dari awal pembentukannya. Pembelajaran dilaksanakan dengan individu maupun kelompok menggunakan beberapa kitab kalisik berbahasa arab dengan pengelompokan kelas yang tidak berdasarkan pada waktu tertentu melainkan dengan dasar tamatnya kitab.<sup>70</sup>

2. Pondok pesantren *khalafiyah* atau *ashriyah*. Kata *khalaf* memiliki arti kemudian atau belakang sedangkan kata *ashriyah* memiliki arti sekarang atau modern. Pondok pesantren *khalafiyah* merupakan pondok yang melaksanakan kegiatan pendidikan melalui pendekatan modern dengan suatu pendidikan formal, baik madrasah (MI, MTs, MA atau MAK) atupun klasikal pondok pesantren *khalafiyah* dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan dengan program-program yang didasarkan pada satuan waktu seperti catur wulan, semester, tahun, kelas dan seterusnya. Dalam pondok pesantren *khalafiyah* kata pondok lebih banyak berfungsi sebagai asrama yang menghadirkan lingkungan kondusif untuk pendidikan agama.<sup>71</sup>

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu berfungsi sebagai perbandingan terhadap penelitian yang ada dan memperoleh gambaran yang pasti tentang posisi penelitian ini. Selain itu, adanya hasil penelitian terdahulu dapat menambah suatu informasi serta teori-teori yang berkaitan dengan judul yang diteliti. Penulis mengacu pada beberapa karya yang bidang kajiannya bersagkutan dengan tema penelitian, diantaranya adalah:

1. Ahmad Haris Mabruri, Skripsi Universitas Jember yang berjudul “Model Pendidikan Terpadu pada Madrasah Aliyah Model Pondok Pesantren Zainul Hasan Kabupaten Probolinggo”.<sup>72</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep penyelenggaraan pendidikan terpadu di Madrasah Aliyah

---

<sup>70</sup>Ahmad Saifuddin, “Eksistensi Kurikulum Pesantren dan Kebijakan Pendidikan”, 12.

<sup>71</sup>Ahmad Saifuddin, “Eksistensi Kurikulum Pesantren dan Kebijakan Pendidikan”, 13.

<sup>72</sup>Ahmad Haris Mabruri, “Model Pendidikan Terpadu pada Madrasah Aliyah Model Pondok Pesantren Zainul Hasan Kabupaten Probolinggo”. (Skripsi, Universitas Jember, 2014).

Model Zainul Hasan Probolinggo merupakan proses penerapan pendekatan penyelenggaraan yang menekankan pada keterpaduan pola asuh, kurikulum materi, serta ranah kognitif, afektif serta psikomotorik sehingga menghasilkan peserta didik yang berfikir kritis, sistematis serta berwawasan ilmu pengetahuan umum dan memiliki karakter sesuai ajaran agama Islam. Persamaan skripsi Ahmad Haris dengan judul yang peneliti ambil terletak pada keterpaduan pendidikan antara madrasah dan pondok pesantren. Sedangkan perbedaannya terletak pada ranah pembahasan tentang manajemen anatara madrasah dan pondok pesantren.

2. M. Fathir Al-Anwari, Diploma Tesis UIN Raden Fatah Palembang yang berjudul “Manajemen Kurikulum Sekolah Petang di Pondok Pesantren Nurul Islam Seri Bandung Ogan Ilir”.<sup>73</sup> Dalam penelitian tersebut terkaji bahwa manajemen kurikulum yang terfokus pada proses pada proses manajemen kurikulum yang ada di Sekolah Petang Pondok Pesantren Nurul Islam Seri Bandung. Persamaan skripsi M. Fathir Al-Anwari dengan judul yang peneliti ambil terletak pada kajian manajemen kurikulum yang diteliti. Sedangkan perbedaannya terletak pada kajian tentang manajemen Fathir yang berada pada ranah kurikulum, sedangkan peneliti lebih meluas pada manajemen pendidikan yang lainnya.
3. Moh. Nur Faiz, Skripsi STAIN Kudus yang berjudul “Implementasi Manajemen Pembelajaran Pondok Pesantren dalam Meningkatkan Hasil Belajar Program Tahassus Kelas 4 Mata Pelajaran Fiqih di Pondok Pesantren Qaumaniyah Putra Kauman Jekulo Kudus tahun Pelajaran 2016/2017”<sup>74</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pembelajaran pondok merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pendidikan. Persamaan skripsi Nur Faiz dengan judul yang peneliti ambil terletak pada manajemen yang digunakan sebagai titik acuan seberapa berhasilnya pendidikan. Sedangkan perbedaannya berada pada cakupan manajemen Nur Faiz yang berada pada ranah pembelajaran

---

<sup>73</sup>M. Fathir Al-Anwari, Diploma Tesis UIN Raden Fatah Palembang yang berjudul “Manajemen Kurikulum Sekolah Petang di Pondok Pesantren Nurul Islam Seri Bandung Ogan Ilir”, (Diploma Tesis, UIN Raden Fatah Palembang, 2019).

<sup>74</sup>Moh. Nur Faiz, “Implementasi Manajemen Pembelajaran Pondok Pesantren dalam Meningkatkan Hasil Belajar Program Tahassus Kelas 4 Mata Pelajaran Fiqih di Pondok Pesantren Qaumaniyah Putra Kauman Jekulo Kudus tahun Pelajaran 2016/2017”, (Skripsi, STAIN Kudus, 2017).

pondok pesantren sedangkan peneliti pada manajemen pendidikan madrasah serta pondok pesantren.

### C. Kerangka Berfikir

Organisasi adalah sekelompok orang yang terkumpul dalam satu wadah demi mencapai tujuan yang sama secara bersama-sama. Demikian dalam lembaga pendidikan, diperlukan organisasi yang baik dan kuat demi tercapainya suatu tujuan pendidikan yang berkualitas. Pimpinan beserta staf guru dan karyawan harus bisa bekerja sama dengan baik demi terwujudnya lembaga pendidikan yang bonafit. Pada suatu organisasi manajemen menjadi salah satu unsur yang sangat penting. Manajemen yang baik hendaknya mengatur seluruh bagian dalam organisasi. Sehingga semua program dan kegiatan tersebut dapat dijalankan dengan baik. Hal ini juga berlaku pada organisasi pendidikan. Jalannya suatu organisasi pendidikan tentu tidak terlepas dari manajemen pendidikan.

Manajemen pendidikan merupakan komponen yang sangat penting demi terlaksananya pendidikan yang baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen pendidikan adalah usaha-usaha yang berhubungan dengan aktifitas pendidikan yang didalamnya terjadi proses mempengaruhi, memotivasi kreatifitas peserta didik dengan menggunakan alat-alat pendidikan, metode, sarana dan prasarana serta media yang diperlukan dalam melaksanakan pendidikan. Dengan manajemen yang baik, pendidikan menjadi jelas arah dan *job description* terstruktur tepat sehingga dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Madrasah dan pondok pesantren telah memberikan banyak kontribusi dalam perkembangan pendidikan Indonesia dengan menciptakan lulusan yang unggul dan berkompeten. Pendidikan akan tercapai secara maksimal jika sistem yang baik dapat dikelola dan diterapkan secara terus menerus dan berlanjut. Madrasah dan pondok pesantren yang didirikan dalam satu yayasan dan tingkatan pendidikan yang sama dimana siswa madrasah tersebut juga menjadi santri yang menetap di pondok pesantren. Kedua lembaga yang bersinergi akan memudahkan terjalinnya hubungan dan kerja sama antara pengurus, pendidik, pengasuh serta siswa sehingga pelaksanaan dan tujuan pendidikan akan berjalan maksimal.



Bagan 2.1

Kerangka Berfikir

